

Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Jember

Nikmah Anif Ustami¹, Ika Sisbiantari², Hari Karyadi³
nikmahanif7@gmail.com

Abstract

As a place to raise funds, OJK wants BPRs to maintain good financial performance, especially in Jember Regency. This study aims to determine whether the financial performance of BPR is better before or after OJK supervision. This research method uses descriptive analysis with data analysis techniques using descriptive statistics with data normality test and Paired Sample T-Test for data with normal distribution and Wilcoxon Signed Test for data with abnormal distribution. The results obtained that the ROA significance value was $0.743 > 0.05$, so there was no significant difference before and after supervision. The results of the ROE significance value obtained $0.002 < 0.05$, so there is a significant difference before and after supervision. The significance value of BOPO was $0.664 > 0.05$, so there was no significant difference before and after supervision. The significance value of NIM is $0.243 > 0.05$, so there is no significant difference before and after supervision. The significance value of LDR is $0.796 > 0.05$, so there is no significant difference before and after supervision. The results of this study indicate that BI and OJK do not have a significant effect on the financial performance of BPRs in Jember Regency.

Keywords: *Financial Performance, Financial Services Authority, Rural Banks*

Abstrak

Sebagai tempat penghimpun dana, OJK ingin BPR menjaga kinerja keuangannya dengan baik khususnya di Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan BPR lebih baik sebelum atau sesudah pengawasan OJK. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan uji normalitas data dan uji beda Paired Sample T-Test untuk data berdistribusi normal dan Wilcoxon Signed Test untuk data berdistribusi tidak normal. Hasil yang didapatkan nilai signifikansi ROA didapat $0,743 > 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah pengawasan. Hasil nilai signifikansi ROE didapat $0,002 < 0,05$ maka terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah pengawasan. Nilai signifikansi BOPO didapat $0,664 > 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah pengawasan. Nilai signifikansi NIM didapat $0,243 > 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah pengawasan. Nilai signifikansi LDR didapat $0,796 > 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah pengawasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BI dan OJK tidak memberikan efek perubahan signifikan pada kinerja keuangan BPR di Kabupaten Jember.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perkreditan Rakyat

^{1,2,3} Universitas Jember

Pendahuluan

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik. Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kinerja keuangan dapat dilihat melalui rasio keuangan dan laporan keuangan yang selanjutnya akan diketahui baik buruknya suatu BPR. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BPR yaitu adanya regulasi atau peraturan yang mengatur tentang seluruh kegiatan perbankan.

Dilihat dari fungsi utama perbankan yaitu menghimpun dan dari masyarakat dan penyaluran dana masyarakat, maka peraturan tersebut dibuat agar BPR tidak salah langkah dalam pengelolaan dana. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 yaitu pemberian wewenang kepada Bank Indonesia untuk memberikan pembinaan dan pengawasan pada lembaga perbankan agar mampu beroperasi secara efektif dan berkinerja sehat, serta bersaing secara global. Namun, adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, pengawasan pada sektor perbankan dialihkan pada lembaga sektor jasa keuangan yang bersifat independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terbentuknya OJK dilandasi motivasi untuk meningkatkan kualitas sektor jasa keuangan salah satunya BPR sehingga kegiatan sektor jasa keuangan tercover dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2013, pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK. OJK menilai kinerja keuangan melalui laporan keuangan BPR yang terdapat beberapa rasio

keuangan, salah satunya *return on asset*, *return on equity*, biaya operasional terhadap pendapatan operasional, *net interest margin*, dan *loan deposit ratio*.

Di Kabupaten Jember, OJK menjadikan laporan keuangan sebagai alat pengukuran BPR dan dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap BPR agar dapat menjadikan lebih baik ke depannya. Tujuan adanya pemeriksaan agar supaya BPR tetap terjaga kesehatannya dan dapat melihat perbedaan pada saat sebelum dan sesudah OJK mengawasi. Menurut Fahmi (2017) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Orang yang berwenang dalam membuat dan mengukur tingkat kesehatan bank dari laporan keuangan adalah manajer keuangan. Manajemen keuangan memiliki tugas untuk menentukan anggaran dana agar pembiayaan perusahaan lebih terstruktur. Manajemen keuangan membaca rasio keuangan bank untuk menentukan baik buruknya perusahaan dan yang berkordinasi langsung dengan OJK. Sebagai contoh penilaian rasio ROA merupakan suatu penilaian terhadap bank dengan menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset perusahaan. Nilai rasio ROE biasanya dicerminkan dengan mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham, serta ROE dapat dijadikan sebagai indikator penilaian dari sudut pandang investor.

Nilai rasio BOPO dapat dijadikan cerminan dari efisiensi suatu bank karena bank mengoperasikan usahanya menggunakan sumber daya atau faktor

produksi yang maksimal agar mendapatkan pendapatan. Nilai rasio NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Nilai rasio LDR digunakan bank sebagai penilaian kesehatan keuangan bank dalam pemberian kredit yang sudahimbang atau tidak dengan modalnya.

Pada saat diawasi oleh BI, BPR di Kabupaten Jember tergolong rendah nilainya dibandingkan dengan bank konvensional. Hal inilah yang menjadi tujuan OJK dalam pengawasan BPR agar berkembang dan mampu bersaing secara global. Dengan demikian penelitian ini dibuat untuk membandingkan kinerja keuangan BPR di Kabupaten Jember sebelum pengawasan OJK tahun 2009-2013 dan sesudah pengawasan OJK tahun 2014-2018. Nilai yang dibandingkan yaitu ROA, ROE, BOPO, NIM, dan LDR dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan uji normalitas serta uji beda dua rata-rata *Paired Sample T-Test* untuk data berdistribusi normal dan Uji *Wilcoxon Signed Rank Test* untuk data tidak berdistribusi normal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang didapat adalah apakah terdapat perbedaan *return on assets*, *return on equity*, Biaya operasional terhadap pendapatan operasional, *net interest margin*, dan *loan deposit ratio* sebelum dan sesudah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan periode 2009-2013 dan 2014-2018?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menguji dan menganalisis ada tidaknya perbedaan antara *return on assets*, *return on equity*, Biaya operasional terhadap pendapatan operasional, *net interest margin*, dan *loan deposit ratio* sebelum dan sesudah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan periode 2009-2013 dan 2014-2018.

Tinjauan Pustaka

Manajemen Keuangan

Menurut Sutrisno (2017) menjelaskan bahwa manajemen keuangan merupakan semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Manajemen keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan pada perusahaan karena keuangan merupakan salah satu dasar pondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan.

Kinerja Keuangan Perbankan

Faranita (2016) menjelaskan bahwa kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dilandasi dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan bank yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Kinerja keuangan merupakan suatu alat ukur dalam penilaian suatu pencapaian terdahulu.

Laporan Keuangan

Arief (2016) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang merangkum seluruh kegiatan dan aktivitas perusahaan. Tugas dari manajer keuangan melakukan penyusunan laporan keuangan dan mengevaluasi kinerja keuangan. Laporan keuangan juga disebut laporan pertanggungjawaban dari manajer keuangan bank atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepada pihak yang berkepentingan terhadap bank.

Rasio Keuangan

Wardiyah (2017) berpendapat bahwa analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dan memiliki tujuan untuk menentukan efisiensi kinerja dari manajer bank.

Bank Perkreditan Rakyat

Kasmir (2017) berpendapat Bank perkreditan rakyat atau BPR merupakan bank sekunder yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka atau tabungan pemberian kredit.

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono

(2017) menjelaskan bahwa penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau dua waktu yang berbeda. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang analisisnya menggunakan statistik atau angka-angka untuk menjelaskan pengaruh variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja BPR di Kabupaten Jember dengan menggunakan beberapa rasio keuangan seperti ROA, ROE, BOPO, NIM dan LDR.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari *website* www.ojk.go.id dan laporan publikasi tahunan BPR dari perhitungan rasio keuangan untuk menghitung ROA, ROE, BOPO, NIM, dan LDR.

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu untuk ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah 24 BPR yang dibentuk pada tahun 2009-2013 hingga 2014-2018 di Kabupaten Jember.

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel pada penelitian ini adalah 12 BPR yang berada di Kabupaten Jember dengan menggunakan *purposive sampling*.

Hasil dan Pembahasan

ROA Sebelum dan Sesudah Pengawasan OJK

Hasil pengujian hipotesis terhadap rasio ROA menunjukkan terdapat kenaikan pada 12 sampel BPR yang diawasi OJK. Pada periode sebelum pengawasan OJK, nilai rata-rata ROA sebelum pengawasan OJK sebesar 6,10 lebih besar dari nilai rata-rata sesudah pengawasan OJK sebesar 5,91. Pada periode sesudah pengawasan nilai ROA mengalami penurunan dibandingkan sebelum pengawasan. Semakin tinggi nilai ROA maka dapat membuktikan bahwa bank dapat mengelola asetnya dengan baik. Dalam hal ini menunjukkan bahwa OJK belum berhasil dalam pengawasan BPR karena belum dapat meningkatkan nilai ROA.

Variabel rasio ROA berdasarkan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* dengan tingkat signifikansi 5% (0,05) diperoleh 0,743 sehingga $0,743 > 0,05$ artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara ROA sebelum dan sesudah pengawasan OJK. Tidak adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas masih sama antara sebelum dan sesudah pengawasan. Hal ini disebabkan karena OJK masih menggunakan kebijakan dari BI agar kestabilan tetap terjaga.

ROE Sebelum dan Sesudah Pengawasan OJK

Hasil pengujian hipotesis terhadap rasio ROE menunjukkan terdapat kenaikan pada 12 sampai BPR yang diawasi OJK. Pada periode sebelum pengawasan OJK nilai rata-rata ROE sebesar 22,06 lebih sedikit dari nilai rata-rata ROE sesudah pengawasan OJK sebesar 28,73. Pada periode sesudah pengawasan ROE

mengalami kenaikan dibanding sebelum pengawasan. Semakin tinggi nilai ROE maka dapat membuktikan bahwa bank dapat memperoleh kenaikan laba bersih yang baik. Jika laba bersih naik maka harga saham juga ikut naik.

Variabel rasio ROE berdasarkan Uji *Wilcoxon Signed Rank Test* dengan tingkat signifikansi 5 % (0,05) diperoleh 0,002 sehingga $0,002 < 0,05$ artinya terdapat perbedaan signifikan antara BPR sebelum dan sesudah pengawasan OJK. Hal ini disebabkan karena BPR mampu dalam pengelolaan laba bersih sebelum pajak menjadi modal yang dapat mereka putar untuk keberlangsungan BPR. Pengawasan OJK mampu mempengaruhi BPR dalam pengelolaan modal usahanya melalui penilaian kinerja ROE.

BOPO Sebelum dan Sesudah Pengawasan OJK

Hasil pengujian hipotesis BOPO menunjukkan terdapat kenaikan pada 12 sampel BPR yang diawasi OJK. Hasil dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif yaitu pada periode sebelum pengawasan OJK, nilai rata-rata BOPO sebesar 79,80 lebih sedikit dari nilai rata-rata BOPO sesudah pengawasan OJK sebesar 80,57. Semakin tinggi nilai BOPO maka dapat membuktikan bahwa bank tidak efisien dalam mengelola biaya operasionalnya.

Variabel rasio BOPO berdasarkan Uji *Wilcoxon Signed Test* dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 diperoleh 0,664 sehingga $0,664 > 0,05$ artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara BOPO sebelum pengawasan dan BOPO sesudah pengawasan. Tidak adanya perbedaan pada nilai rasio BOPO sebelum dan sesudah

pengawasan OJK menunjukkan bahwa pendapatan operasional dan biaya operasional sama bahkan cenderung menurun. Hal ini disebabkan bahwa biaya operasional lebih besar dari pendapatan operasionalnya. Jika bank tidak dapat mengendalikan biaya operasional akan berdampak buruk bagi kinerja dan kesehatan BPR. BOPO berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menjalankan operasionalnya. Dalam BPR, pendapatan operasional didapatkan dari bunga nasabah sedangkan biaya operasional didapatkan dari bunga biaya dana pihak ketiga. Umumnya pihak ketiga meminta bunga yang lebih tinggi sehingga bank menjadi kritis dalam hal suku bunga. Hal ini juga berpengaruh buruk jika pendapatan operasional tidak memenuhi syarat atau pendapat tidak dapat menutupi biaya operasionalnya. Tanpa pendapatan operasional bank tidak akan berjalan dengan baik karena bank tidak bisa bergantung penuh dengan pihak ketiga.

NIM Sebelum dan Sesudah Pengawasan OJK

Hasil pengujian hipotesis NIM menunjukkan terdapat kenaikan pada 12 sampel BPR yang diawasi OJK. Hasil dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif yaitu pada periode sebelum pengawasan OJK, nilai rata-rata NIM sebesar 17,06 lebih sedikit dari nilai rata-rata NIM sesudah pengawasan OJK sebesar 18,57. Semakin tinggi nilai NIM maka dapat membuktikan bahwa bank dapat mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih.

Variabel rasio NIM 0,05 diperoleh 0,243 sehingga $0,243 > 0,05$ artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara NIM sebelum pengawasan OJK dan NIM sesudah pengawasan OJK. Tidak adanya

perbedaan pada nilai rasio NIM sebelum dan sesudah pengawasan OJK menunjukkan bahwa rasio profitabilitas masih sama antara sebelum dan sesudah pengawasan. Artinya pengawasan OJK tidak berpengaruh pada rasio ini tetapi rasio NIM cenderung sehat dan stabil. Sama dengan BOPO, NIM juga perlu dinaikkan lebih sedikit agar BPR tetap sehat. OJK masih berupaya menstabilkan nilai NIM pada BPR dengan tujuan agar BPR terbiasa dengan keadaan ekonomi dan kebijakan yang berganti-ganti. Hal ini menunjukkan bahwa BPR di Kabupaten Jember bisa menyesuaikan dan mengelola bunga bersihnya dan perlu menaikkan nilai rasio lebih sedikit dengan cara menurunkan suku bunga.

LDR Sebelum dan Sesudah Pengawasan OJK

Hasil pengujian hipotesis terhadap rasio LDR menunjukkan terdapat kenaikan pada 12 sampel BPR yang diawasi OJK. Hasil dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif yaitu pada periode sebelum pengawasan OJK, nilai rata-rata LDR sebesar 77,74 lebih sedikit dari nilai rata-rata LDR sesudah pengawasan OJK sebesar 78,20. Rasio LDR yang rendah mengindikasikan banyak dana yang menganggur yang belum disalurkan dalam kredit, namun kualitas likuiditas baik. Sebaliknya, apabila rasio LDR tinggi berarti penyaluran dana dalam bentuk kredit optimal, namun kemampuan likuiditas bank kurang baik. Penilaian ideal rasio LDR pada perbankan adalah kisaran 75%-90% menurut BI. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa OJK berhasil dalam pengawasan BPR karena dapat mempertahankan nilai LDR di kisaran nilai ideal.

Variabel rasio LDR berdasarkan

uji *paired sample t-test* dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 diperoleh 0,796 sehingga $0,796 > 0,05$ artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara LDR sebelum pengawasan OJK dan LDR sesudah pengawasan OJK. Tidak adanya perbedaan pada nilai rasio LDR sebelum dan sesudah pengawasan menunjukkan bahwa likuiditas BPR di Kabupaten Jember masih tergolong sama dan stabil. OJK masih menekankan pada peningkatan manajemen risiko dengan prinsip hati-hati agar BPR tidak salah langkah dalam pengelolaan dan LDR yang berada dinilai stabil dan aman dapat memberikan bukti kesehatan bank pada masyarakat untuk menghimpun dananya. Pentingnya LDR yaitu sebagai indikator penilaian likuiditas bank dalam kompetensi membayar kembali kewajiban bank terhadap nasabah. BPR dan OJK membutuhkan LDR karena sebagai alat penilai seberapa sehat usaha BPR yang dijalankan. LDR memiliki nilai aman di kisaran 75-90 % maka bank dianggap sehat. LDR yang kecil menunjukkan bahwa himpunan dana yang kecil tetapi pinjaman dana lebih besar, sedangkan LDR yang besar menunjukkan bahwa himpunan dana cukup tetapi peminjam dan lebih sedikit. Hal ini dapat mempengaruhi perputaran dana pada bank yang tidak lancar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap variabel ROA (*return on assets*) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara ROA sebelum pengawasan OJK tahun 2009-2013

dengan ROA sesudah pengawasan OJK tahun 2014-2018.

2. Pengujian terhadap variabel ROE (*return on equity*) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara ROE sebelum pengawasan OJK tahun 2009-2013 dengan ROE sesudah pengawasan OJK tahun 2014-2018.
3. Pengujian terhadap variabel BOPO (biaya operasional terhadap pendapatan operasional) tidak terdapat perbedaan signifikan antara BOPO sebelum pengawasan OJK tahun 2009-2013 dengan BOPO sesudah pengawasan OJK tahun 2014-2018.
4. Pengujian terhadap variabel NIM (*net interest margin*) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara NIM sebelum pengawasan OJK tahun 2009-2013 dengan NIM sesudah pengawasan OJK tahun 2014-2018.
5. Pengujian terhadap variabel LDR (*loan deposit to ratio*) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara LDR sebelum pengawasan OJK tahun 2009-2013 dengan LDR sesudah pengawasan OJK tahun 2014-2018.

Saran

Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Memperpanjang periode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat digeneralisasikan.
2. Untuk mewujudkan kinerja keuangan BPR agar lebih baik kedepannya, maka perlu meningkatkan pengawasan OJK agar lebih kritis dalam memeriksa kinerja BPR. Tujuannya untuk

meminimalisir pemalsuan laporan keuangan.

3. Untuk BPR di Kabupaten Jember agar selalu menjaga kinerja keuangannya tetap sehat meski sudah ada OJK untuk tugas pemeriksaan. Tetapi, untuk yang berada langsung di lapangan penting juga berhati-hati dalam mengelola dana masyarakat dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Admadjaya, L. (2008). *Manajemen Keuangan dan Aplikasi, Edisi Revisi*. Jakarta: Andi Offset.
- Agus, H dan Martono (2014). *Manajemen Keuangan Perbankan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Anugrasandi, Mohammad Jathy (2016). Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional dengan pendekatan RGEC (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri Tahun 2013-2015). Malang.
- Arief, S (2016). *Panduan Praktis Analisis Laporan Keuangan*. PT Grasindo: Jakarta.
- Asroi, M. (2015). Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Perbankan. *Jurnal IAIN Salatiga*.
- Fahmi, I (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan ke-2 Bandung: Alfabeta.
- Faustina,N. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Bank Perkreditan Kabupaten Semarang.
- Hanafi, M (2003). *Manajemen Keuangan*. BPFE, Yogyakarta.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keuangan, O.J. (2018). *Booklet Perbankan Indonesia*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Keuangan, O.J. (2009-2018, Desember). *Laporan Keuangan BPR pada Kabupaten Jember*. Retrieved Oktober 2019, from <http://www.ojk.go.id>
- Keuangan, O.J. (n.d.).
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, D. (2001). *Manajemen Keuangan*. Jogjakarta: BPFU-UGM.www.ojk.go.id
- Yatiningsih,N. (2015). Analisis Pengaruh BOPO, LDR, NPL, Size, CAR,dan NIM Terhadap ROA